

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi sejahtera. Namun adanya kondisi yang menunjukkan taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan serangkaian aktivitas perubahan dan perbaikan didalam masyarakat yang mengalami masalah sosial perlu dipahami berbagai hal yang berkaitan dengan seluk beluk permasalahannya. Merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 yang mengamanatkan terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut perlu adanya upaya terpadu, terarah dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Definisi dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 diatas mengakomodir dua perspektif sekaligus, yakni perspektif ekonomi dan perspektif sosial. Perspektif ekonomi berupa tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan perspektif sosial berupa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup

setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, dan lainnya. Sehingga kemiskinan menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya adalah rumah. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi sangat strategis, baik ekonomi, sosial budaya dan psikologis bagi individu dan keluarga. Tidak hanya dipandang dalam aspek fisik, tetapi juga mencakup bagi kehidupan bermasyarakat.

Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak maka harus dipenuhi syarat fisik rumah yaitu aman sebagai tempat berlindung, memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Selain itu rumah merupakan media bagi pelaksanaan tumbuh kembangnya anak dalam keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercapai keharmonisan dan ketahanan keluarga. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah kemiskinan. Dengan ini salah satu penanggulangan kemiskinan dalam bentuk penyediaan akses adalah pelayanan rumah dan permukiman

Namun pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan dan layak huni tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga miskin rumah hanyalah tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni

berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Oleh sebab itu kepedulian untuk menangani masalah tersebut Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan mengalokasikan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat ataupun daerah.

Salah satu daerah yang melaksanakan program RTLH adalah Kabupaten Temanggung yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung. Program RTLH merupakan upaya sebagai penanggulangan kemiskinan terutama untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Temanggung. Program RTLH di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Kesejahteraan Sosial (Bidang Kesos) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaannya Bidang Kesos dibantu oleh seorang TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sendiri dibentuk dalam rangka membantu pemerintah di setiap kecamatan. Pelaksanaan Program RTLH ini dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jika di lihat dari angka kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun pada tahun 2018 untuk data tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 presentase penduduk miskin sebesar 7.529 (persen).

Hal ini bisa di lihat dari data berikut ini untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2012-2018.

Tabel. I.1

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Presentase penduduk miskin (persen)
2012	12.32	8.949
2013	12.46	9.122

2014	11.55	8.553
2015	11.76	8.745
2016	11.60	8.709
2017	11.46	8.677
2018	9.87	7.529

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2012 - 2018

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Dalam pelaksanaan Program RTLH ini pendekatan wilayah dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin salah satunya di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari petugas TKSK Kecamatan Gemawang sendiri untuk masyarakat penerima RTLH yang berada di Kecamatan Gemawang pada tahun 2018 sejumlah 9 rumah. Jika di lihat dari data kemiskinan yang ada di Kecamatan Gemawang berdasarkan lampiran XX Keputusan Bupati Temanggung Nomer: 465/447 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 16.083 jiwa sehingga tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Gemawang sebesar 6,18 % hal ini lah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kecamatan Gemawang cukup tinggi diwilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu Kecamatan Gemawang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Temanggung, dilihat dari kondisi letaknya Kecamatan Gemawang berjarak sekitar 20 km ke Kabupaten Temanggung sehingga akses menuju Kabupaten Temanggung termasuk wilayah yang cukup jauh tentunya mempengaruhi juga akses masyarakat yang berada di Kecamatan Gemawang dalam meningkatkan perekonomian dari akses pedesaan menuju ke perkotaan sehingga mempengaruhi

tingkat perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Gemawang. Dari data yang ada memang dirasa perlu dikaji kaitan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Dengan adanya bantuan RTLH yang diberikan kepada masyarakat miskin ini apakah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang bisa dijadikan sebagai bahan adanya pengkajian yang mendalam berkaitan dengan penelitian efektif tidaknya program yang dijalankan melalui bantuan RTLH ini untuk masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki rumah tinggal layak huni jika yang diberikan hanya 9 rumah namun untuk tingkat kemiskinannya sebesar 6,18% selain bentuk dari pelaksanaan dari program RTLH tersebut melalui TKSK itu sendiri tentunya perlu diketahui efektifitas tidaknya yang diterima oleh masyarakat hal ini berkaitan dengan bentuk dari tepat sasaran program yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat ataupun dapat memberikan suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian suatu tujuan sebagai pengukuran suatu target yang tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga dari tingkat kemiskinan yang tinggilah peneliti berusaha untuk melakukan penelitian yang ada di Kecamatan Gemawang berkaitan dengan efektifitas Program Bantuan RTLH melalui TKSK di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung Tahun 2018?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dengan diadakan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengaplikasikan teori efektifitas kebijakan, khususnya untuk memperkaya kajian mengenai efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bersifat praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kebijakan dan perencanaan kebijakan berikutnya, khususnya tentang Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

b. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi tentang pelaksanaan program RTLH.

E. KERANGKA TEORI

1. PENELITIAN TERDAHULU TENTANG RTLH

Dalam tinjauan, penulis akan menyampaikan penelitian terdahulu mengenai penelitian tentang (RTLH) yang pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan, sehingga jelas perbedaannya dengan penelitian terdahulu.

Pertama, Haryati Roebyantho (2014), melakukan penelitian mengenai implementasi program bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Garut. Penelitian tersebut berjudul: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) digunakan untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program BANSOS-RTLH yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 ini masih belum mencapai sasaran yang ditentukan dan belum ada kejelasan kualifikasi pendamping program serta dalam pelaksanaan setiap tahapan belum runtut dan belum semuanya terlaksana. Hal itu terjadi karena belum adanya sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, Nonivili Julianti Gulo (2015), melakukan penelitian mengenai efektivitas pemberdayaan masyarakat miskin melalui program RS-RTLH. Penelitian ini berjudul: Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Nias Barat adalah efektif dengan nilai skala Likert 0,59. Indikator pemahaman program sebanyak 0,71. Ketepatan sasaran sebanyak 0,66. Ketepatan waktu 0,63 dan tercapainya tujuan

sebanyak 0,38 dimana perubahan nyata dilihat dari kondisi-kondisi rumah responden yang menjadi layak huni.

Ketiga, Putri Prissilia Pramitha (2016), melakukan penelitian Evaluasi kinerja program Pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga. Evaluasi kinerja program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori program yang baik, meskipun belum merata dan belum dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan kemiskinan, karena program ini hanya memiliki dampak pada aspek pengentasan kemiskinan yaitu dalam hal papan.

Keempat, Rizki Weirbowo (2015), melakukan kajian evaluatif terhadap program RS-RTLH dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Evaluatif Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kota Tegal. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, ditemukan hasil yaitu secara keseluruhan pelaksanaan program masih belum maksimal dan terkesan monoton. Selain itu setelah pelaksanaan program, masyarakat masih belum dapat dikatakan sejahtera karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

Kelima, Putri Prissilia Pramitha (2016), melakukan penelitian Evaluasi kinerja program Pemugaran rumah tidak layak huni di kabupaten purbalingga. evaluasi kinerja program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori program yang baik, meskipun belum merata dan belum dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan kemiskinan, karena program ini hanya memiliki dampak pada aspek pengentasan kemiskinan yaitu dalam hal papan.

Keenam, Tri Wahyuningrum dan Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. (2015) melakukan penelitian tentang Evaluasi program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di desa kedungharjo kecamatan balerejo kabupaten madiun. program

Pemugaran RTLH di Desa Kedungrejo masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah 1) pihak desa Kedungrejo melakukan survey terkait kondisi rumah calon kelompok sasaran dan memprioritaskan bagian rumah yang akan direnovasi selain ALADIN, sehingga dana bantuan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan, 2) kelompok sasaran membuat surat pernyataan bahwa rumah yang akan di Pemugaran tidak dalam status konflik, 3) diperlukan pengawasan mulai dari proses sosialisasi agar tidak terjadi missskomunikasi antara pihak penyelenggara dengan kelompok sasaran.

Ketujuh, Ruli Khusnu Rizka (2010) meniti tentang Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di kota Surakarta. Efisiensi pelaksanaan program, belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan yang terjadi dalam kepanitiaan tingkat kota. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan program berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial masih belum begitu tinggi. Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah tidak layak huni juga masih cukup rendah.

Kedelapan, Maulana Candra Atmajha (2015), Evaluasi pelaksanaan program Pemugaran rumah tidak layak huni sebagai upaya pengentasan kemiskinan dikota Tanjung Pinang. secara umum penelitian ini dilihat dari dimensi masukan (input) yang indikatornya terdiri dari ketersediaan pegawai, kesesuaian data penerima, pedoman teknis dan biaya pada evaluasi program rumah tidak layak huni (RTLH), kecenderungan responden berpendapat masih belum optimal, untuk dimensi aktivitas atau proses dengan indikator yang digunakan yaitu waktu masih kurang dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaanya, tetapi untuk pengawasan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan dimensi hasil (output) dengan indikator kualitas program, kelayakan program, dan ketepatan program sudah baik.

Kesembilan, Sarimah (2016), Pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan karas kecamatan galang kota batam tahun 2014. pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) diKelurahan Karas Tahun 2014 sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang timbul, instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata, dalam hal ini bisa dikatakan kurang keseriusan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi demi keberhasilan kegiatan ini.

Kesepuluh, Abu Bakar Tahun (2015) dengan judul Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2010. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teori William N.Dunn (2003 : 610), yaitu : (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Perataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan RS-RTLH di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang sudah berjalan tepat sasaran, namun belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Karena program RS-RTLH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur.

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian di atas bahwa penelitian yang sudah dilakukan atau dilaksanakan mengenai Rumah Tidak Layak Huni terfokus pada pelaksanaan dan evaluasinya namun tidak dicantumkan sumber dana yang diperoleh untuk Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Perbedaan Pada penelitian ini penulis berfokus efektifitas program RTLH melalui TKSK untuk

perbedaan lainya adalah terletak pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian diskripsi ini dilaksanakan di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung sedangkan lokasi penelitian terdahulu dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia.

2. PROGRAM

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. (Muhaimin, 2009:349)

Selain itu secara pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan, sering pula di artikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian program juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program. (Zainudin, 2014:4)

Dari pengertian diatas bisa dijelaskan bahwa program merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

3. EFEKTIVITAS

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Pandangan Efektifitas dari beberapa ahli

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengukur keefektifan antara lain:

Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.

Robbin (199:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

c. Ukuran Efektivitas

Ukuran atau tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

4. Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Selain itu sesuai dengan “Peraturan Menteri Nomer 32 Tahun 2011 pada Pasal 22 Ayat 1 Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah”.

Kemudian pada Pasal 22 Ayat 6 Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Adapun penjelasannya bisa dilihat pada Pasal 25 sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) Singarimbun dan Effendi, menguraikan Pengertian Konsep atau Definisi Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.” Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang

suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya.

Maka peneliti disini memberikan kerangka konseptual berdasarkan pada pengertian di atas berkaitan dengan Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan, sering pula di artikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Nantinya peneliti akan memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan dari program bantuan RTLH ini.
2. Efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan yang dilakukan oleh organisasi ataupun seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk mengetahui Efektifitas dari program tersebut nantinya peneliti akan mengarahkan kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.
3. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Pada akhirnya nanti peneliti akan mengetahui gambaran efektifitas program bantuan RTLH di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung penelitian ini yaitu untuk mengukur Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial RTLH dimana efektifitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran kerangka teori serta mengacu pada judul tentang “Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Dalam penelitian ini definisi operasionalnya dapat diketahui dalam beberapa indikator. Maka dalam penelitian ini dapat dipahami untuk definisi operasionalnya efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- Aspek tugas atau fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program RTLH akan efektif jika tugas dan fungsinya melalui program yang dijalankan TKSK dan Perangkat dapat dilaksanakan dengan baik selaku pihak pemerintah yang mengurus program RTLH. Berikut indikatornya :
 - Tugas TKSK dalam pelaksanaan RTLH.
 - Fungsi TKSK dalam pelaksanaan RTLH.
 - Tugas Kasi Kesra dalam pelaksanaan RTLH.
 - Fungsi Kasi Kesra dalam pelaksanaan RTLH.

- Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif untuk indikatornya sebagai berikut:
 - Program yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial,
 - Program proses melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik
 - Fasilitas guna meningkatkan kualitas kehidupan.

- Bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
 - Bantuan Sosial dalam bantuan berupa uang, barang, atau jasa dalam melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat
- Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya Indikatornya sebagai berikut:
- Kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
- Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Indikatornya sebagai berikut:
- Bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah seorang peneliti harus mengetahui metodologi penelitian apa yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. (Mulyana, 2013:149)

Metode penelitian bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kombinasi. (Sugiono, 2013:9)

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena metode penelitian ini berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawanya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiono, 2013: 15-14).

Menurut Bogdan dan Taylor (1993:30), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (*holistic*). Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai suatu keutuhan. Sementara itu Denzin dan Lincoln (19990: 40) menjelaskan, "*The word qualitative implies an emphasis on processes and meanings that are nonrigorously examined or measured.*" Jadi, secara tersirat, kata kualitatif ditekankan pada makna dan proses, bukan pada pengukuran dan pengujian secara kaku (*rigid*) sebagaimana yang terjadi pada metode kuantitatif (Upe dan Damsid, 2010: 107-108). Kemudian, juga bisa dipahami bahwa hakikatnya penelitian kualitatif merupakan

satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis. (Prastowo, 2012: 22)

Dalam penelitian ini dapat di kategorikan dalam metode kualitatif karena data yang akan dihasilkan nantinya akan berbetuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka. Selain itu data peneliti dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Jenis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian dapat diketahui untuk jenis data ada dua yaitu data primer dan sekunder. Peneliti nantinya akan menggunakan kedua jenis data ini.

- **Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok serta hasil dari sebuah kejadian. Disini peneliti menggunakan data dari hasil wawancara oleh pihak penerima RTLH maupun pihak pemerintah serta petugas TKSKnya sendiri.

- **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang sudah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen pemerintah maupun dari petugas TKSK.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. (Ghony dan Almanshur, 2014:165)

Teknik pengamatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan partisipatif moderat (*moderate participation*) atau pengamatan yang dilakukan apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka secara seimbang, yakni antara menjadi orang dalam dengan orang luar. Dalam pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan partisipatif hanya dalam beberapa bagian kegiatan dan tidak seluruhnya. (Prastowo, 2012: 233-244)

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini melakukan pengamatan apa yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam pelaksanaan penyelenggaraan program RTLH di Kecamatan Gemawang. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana yang terjadi sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang berlintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga masa mendatang. (Ghony dan Almanshur, 2012: 176)

Sedangkan jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur. Bila dicermati dari pernyataan Guba & Lincoln, bahwa dalam wawancara terstruktur, persoalan didefinisikan dengan peneliti sebelum wawancara. Pertanyaan-pertanyaan telah di rumuskan terlebih dahulu, dan informan diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari masalah. (Prastowo, 2012: 182)

Jadi dalam hal ini peneliti sebelum melakukan wawancara menyiapkan terlebih dahulu instrument penelitian secara terfokus dan terstruktur berkaitan dengan apa yang akan dipertanyakan oleh subjek penelitian terkait topik penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini nantinya peneliti akan menggunakan narasumber antara lain, Petugas TKSK Kecamatan Gemawang, Masyarakat Penerima RTLH Kecamatan Gemawang serta Perangkat Desa.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara. Disamping itu, ada pula sumber bukan manusia atau *nonhuman resources* antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistic. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi. (Prastowo, 2012: 200)

Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data yang bersifat documenter yang bersumber, monografi profil, atau laporan – laporan lain yang dianggap penting dalam penelitian.

4. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2010: 12), objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam

penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi social yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiono, 2007: 49). (Prastowo, 2012: 199)

Jadi dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pemerintah Kecamatan Gemawang.

b. Subjek Penelitian

Secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2006: 132). (Prastowo, 2012: 195)

Sehingga dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian di Kecamatan Gemawang antara lainya terdiri dari:

a. Petugas TKSK Kecamatan Gemawang	: 1 Informan
b. Masyarakat Penerima RTLH Kecamatan Gemawang	: 4 Informan
c. Perangkat Desa Gemawang	: 1 Informan
Total	: 6 Informan

5. Tahap Analisis Data

Secara umum dinyatakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian. (Ghony dan Almanshur, 2014: 246)

Selanjutnya dalam analisis data penelitian kualitatif ini peneliti akan menggunakan analisis dalam model Miles dan Huberman yaitu Reduksi Data.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sehingga dengan Reduksi data dengan demikian dapat mendapatkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles dan Huberman, 2007: 17). (Prastowo, 2012: 242-243)